

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Skripsi ini akan mengkaji mengenai pengaruh dari kebijakan “*War on Terrorism*” yang dicanangkan oleh George W. Bush pasca terjadinya tragedi penyerangan WTC (*Washington Trade Center*) pada 11 September 2001 terhadap partisipasi politik minoritas muslim di Amerika Serikat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), minoritas merupakan golongan sosial dimana jumlah warganya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan golongan lain dalam suatu masyarakat. Sedangkan pengertian muslim yaitu merupakan seseorang yang menganut agama Islam. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan minoritas muslim merupakan sekelompok orang yang tinggal dalam satu wilayah dimana anggotanya merupakan masyarakat muslim dan jumlah warganya jauh lebih kecil dibandingkan dengan golongan lain didalam suatu masyarakat.¹

Minoritas muslim dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan masyarakat mayoritas yang ada di dalam suatu negara, sehingga terkadang mereka tidak mendapatkan hak mereka sebagai warga negara bahkan mereka sering mendapatkan diskriminasi karena perbedaan yang mereka miliki.

¹ Kettani, Ali. (2005). *Minoritas Muslim di Dunia Dewasa Ini*. Jakarta: Grafindo Persada. hal 3

Muslim di Amerika Serikat sudah ada bahkan sebelum Columbus datang ke benua Amerika, hal tersebut terbukti dari adanya wilayah-wilayah dengan nama yang identik dengan islam seperti *Madina* dan *Mecca* yang terletak di negara bagian Ohio, Oklahoma dan California. Selain itu kedatangan muslim di Amerika Serikat pada abad 18 dan 19 tidak lepas dari peran para penjelajah yang membawa budak dari Afrika dimana seperlima budak yang dibawa ke Amerika merupakan muslim. Kebanyakan dari mereka menetap di kawasan Selatan Amerika.

Dewasa ini, agama islam menjadi salah satu agama dengan jumlah penganut terbanyak di dunia, yakni sekitar 1 (satu) milyar jiwa. Di Amerika Serikat jumlah masyarakat muslim diperkirakan sekitar 3.3 juta jiwa dari keseluruhan populasi Amerika Serikat yaitu 322 juta jiwa pada tahun 2015 atau sekitar 1% dari keseluruhan populasi penduduk Amerika Serikat. Angka tersebut diperkirakan masih akan terus meningkat pada tahun 2050.² Faktanya di Amerika Serikat yang merupakan negara demokrasi, minoritas muslim sering mendapatkan perlakuan yang berbeda oleh para mayoritas disana, selain itu, mereka juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara Amerika Serikat.

Muslim di Amerika Serikat sering mengalami beberapa kendala dalam menjalankan kehidupan mereka seperti masalah politik, ekonomi, dan sosial. Masalah politik yang mereka hadapi pada saat itu adalah adanya pengingkaran hak-hak politik mereka sebagai komunitas dan

² Besheer, Mohamed. (2016, Januari 06). *Pew Research Center*. Retrieved May 05, 2017, from [PewResearch.org: http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/01/06/a-new-estimate-of-the-u-s-muslim-population/](http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/01/06/a-new-estimate-of-the-u-s-muslim-population/)

penganiayaan para anggotanya.³ Salah satunya yaitu kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah terkadang bertentangan dengan mereka, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam menjalankan kehidupan mereka sebagai warga negara. Selain itu, minoritas muslim di Amerika Serikat juga mengalami masalah ekonomi dimana mereka mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan dan kekecewaan terhadap sistem ekonomi yang dipraktekkan oleh negara tersebut.

Berbagai kendala yang mereka hadapi dalam menjalankan kehidupan mereka, melatarbelakangi mereka untuk beradaptasi dengan kehidupan warga asli Amerika Serikat yang sangat plural, pada awalnya mereka cenderung hanya akan tinggal di lingkungan sesama muslim saja namun dalam perkembangannya mereka mencoba untuk membaaur dengan masyarakat asli Amerika Serikat dan mencoba untuk memperkenalkan islam sebagai agama yang mampu menghormati perbedaan dan bermasyarakat. Salah satu cara mereka agar dapat membaaur serta mendapatkan hak yang sama dengan warga negara Amerika Serikat lainnya yaitu dengan ikut berpartisipasi aktif dalam politik.

Jauh sebelum terjadinya tragedi WTC, minoritas muslim Amerika sebenarnya telah ikut berpartisipasi dalam politik, namun ketika itu tingkat partisipasi politik minoritas muslim Amerika Serikat masih dapat dikatakan rendah karena hanya dilakukan oleh beberapa organisasi islam yang tergabung dalam *the Coordinating Council of the four Muslim*

³ Kettani, Ali, ibid hal 18

political Organizations dimana para anggotanya yaitu *Council on American-islamic Relations (CAIR)*, *the American Muslim Alliance (AMA)*, *the American Muslim Council (AMC)*, dan *the Muslim Political Action Committee (MPAC)*.⁴ Bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh kelompok minoritas muslim yaitu dengan melakukan *lobby* pada Februari 1996, sehingga untuk pertama kalinya dalam sejarah, ibu negara Amerika Serikat pada saat itu yaitu Hillary Rodham Clinton mengadakan makan malam untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri di *White House*.⁵

Partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Amerika Serikat tidak hanya dalam bentuk *lobbying* saja akan tetapi mereka juga berkontribusi dalam pemilihan umum di Amerika Serikat yaitu dengan cara ikut memberikan bantuan dana untuk kampanye bagi kandidat-kandidat politik yang mereka anggap dapat menyalurkan aspirasi mereka diantaranya yaitu pada tahun 1983 ketika pemilihan walikota mereka memberikan dana kampanye kepada Wilson Grade, tahun 1986 pada pemilihan anggota kongres dana kampanye diberikan pada Robert Neall, tahun 1984 pada saat pemilihan presiden mereka juga memberikan dana kampanye kepada Walter Mondale dan Hillary Clinton pada pemilihan anggota kongres tahun 1998.

Selain itu, partisipasi politik yang dilakukan oleh minoritas muslim di Amerika Serikat yaitu dengan memberikan hak suara mereka (*Voting*) pada pemilihan presiden tahun 2000, sehingga sekitar 70 hingga

⁴ Kartini, Indriana. (2004). *Dinamika Minoritas Muslim di Amerika Serikat. Ringkasan laporan penelitian Kelompok Dunia Islam 2004*, 102.

⁵ Kartini, Indriana, *Ibid*

90 persen masyarakat muslim di Amerika Serikat memberikan hak votingnya kepada George W. Bush.

Dukungan yang diberikan oleh masyarakat muslim di Amerika Serikat pada saat itu dikarenakan George W. Bush menjanjikan kebijakan yang pro terhadap muslim dan menentang kebijakan “*Secret Evidence*” dimana muslim menjadi target utama dari kebijakan tersebut. Namun pasca terjadinya peristiwa 9/11, kebijakan *secret Evidence* yang seharusnya ditentang malah kemudian dipraktekkan secara intensif di masa pemerintahan Bush yaitu dengan mengeluarkan kebijakan *PATRIOT Act*.⁶ sehingga pada pemilihan umum presiden tahun 2004, kelompok minoritas muslim Amerika Serikat sepakat untuk menjatuhkan pilihannya kepada kandidat Demokrat, John Kerry.

Permasalahan yang kompleks muncul ketika terjadi tragedi runtuhnya gedung WTC (*Washington Trade Center*) dan rusaknya gedung *Pentagon*, tragedi ini merupakan tragedi yang tidak pernah diduga oleh masyarakat Amerika Serikat dimana hanya dalam hitungan waktu ribuan jiwa terluka dan jutaan orang lainnya dicekam oleh rasa ketakutan.⁷ Salah satu simbol yang dibanggakan oleh Amerika Serikat dan dianggap kuat dan canggih runtuh begitu saja akibat serangan jaringan teroris internasional.

⁶ Kartini, Indriana, *Ibid*

⁷ Khairani, Tiara Putri. (2014). Electronic Thesis and Dissertation (ETD). *Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Kebijakan War on Terrorism pada masa Pemerintahan Bush : Studi Kasus Perang Amerika Terhadap Al Qaeda*, 1.

Peristiwa serangan gedung kembar tersebut terjadi pada saat masa jabatan presiden George W. Bush yang merupakan presiden Amerika Serikat yang ke-43. Beliau memerintah sejak tahun 2001 hingga 2009 karena pada pemilu 2004, beliau memenangkan pemilu kembali dan menjabat hingga tahun 2009. Sejak George W. Bush menjabat sebagai presiden Amerika Serikat, beliau dikenal dengan doktrin yang melekat pada dirinya atau yang biasa disebut sebagai "*Bush Doctrine*". Beberapa elemen utama kebijakan beliau seperti pencegahan terjadinya perang, menentang adanya senjata pemusnah massal dan melawan terorisme, serta mempromosikan demokrasi sangat melekat pada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Bush.⁸

Untuk menanggapi terjadinya serangan tersebut, George W. Bush kemudian membentuk kebijakan "*War on Terrorism*". Kebijakan "*War on Terrorism*" atau yang sering dikenal juga dengan sebutan "*Global War on Terrorism*" diumumkan oleh presiden Bush dalam pidatonya pada kongres yang dilakukan tanggal 20 september 2001.

Dikutip dalam pidatonya, Presiden Bush mengatakan bahwa "*Every nation in every region now has a decision to make, either you are with us or you are with the terrorist. From this day forward, any nation that continues to harbour or support terrorism will be regarded by the United States as a hostile regime*"⁹

⁸ Singh, Robert. (2006). *The Bush Doctrine and The War on Terrorism*. Oxon: Routledge.

⁹ BBC News, (2001). *Text: Bush address to Congress*. diakses pada 28 April 2017, dari <http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/1555641.stm>

Dalam pidatonya, George W. Bush mengajak masyarakat di seluruh dunia untuk bersama-sama memerangi bentuk terorisme serta akan memberikan sanksi kepada setiap negara yang memberikan dukungan kepada jaringan terorisme. Selain itu, Presiden Bush juga menyebutkan bahwa pelaku utama dalam serangan 9/11 adalah organisasi teroris *Al-Qaeda* dan menunjuk Osama bin Laden sebagai dalang utama dan yang bertanggungjawab atas tragedi 9/11.¹⁰ Terbentuknya kebijakan “*War on Terrorism*” merupakan salah satu upaya dari pemerintah Amerika Serikat untuk memberantas isu terorisme dan menciptakan perdamaian di seluruh dunia.

Proyek melawan terorisme ini dilakukan dalam bentuk invasi ke Afghanistan dimana Afghanistan merupakan negara yang melahirkan kelompok radikal *Al-Qaeda*. Invasi di Afghanistan dilaksanakan satu bulan setelah tragedi 9/11 yaitu pada tanggal 7 oktober 2001.¹¹ Selain melakukan invasi ke Afghanistan, kebijakan “*War on Terrorism*” ini juga ditujukan ke Irak. Invasi di Irak merupakan salah satu bentuk strategi pertahanan Amerika Serikat karena Irak dicurigai memiliki senjata pemusnah massal yang sangat membahayakan bagi keamanan dunia sehingga pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk melakukan invasi di Irak.

¹⁰ Amalia, Asilah (2015). *Analisis Propaganda CNN (Cable News Network) terhadap masyarakat Amerika Serikat tentang Al Qaeda*. *EJournal*, *ejournal.hi.fisip-unmul.org*, 521.

¹¹ Kristanti, Elin Yunita. (2014, Oktober 07). *Liputan6*. Retrieved November 16, 2016, from Global Liputan 6: <http://global.liputan6.com/read/2115168/7-10-2001-amerika-serikat-kobarkan-perang-di-afghanistan>

Penerapan kebijakan *War on Terrorism* tidak hanya ditujukan kepada negara-negara yang dicurigai sebagai sumber munculnya terorisme maupun negara yang memiliki senjata pemusnah massal tetapi juga diterapkan di negara yang membuat kebijakan tersebut. Bentuk kebijakan *War on Terrorism* juga diterapkan di Amerika Serikat yaitu dengan dibentuknya kebijakan dalam lingkup domestik yaitu *the USA Patriot Act* pada tahun 2001 serta *Homeland Security Act* tahun 2002.

The USA Patriot Act of 2001 merupakan salah satu kebijakan yang dibentuk oleh presiden George W. Bush guna menanggapi adanya serangan 9/11. Tujuan utama dari dibentuknya kebijakan *the USA patriot Act* adalah untuk mencegah adanya ancaman yang berasal dari internal maupun eksternal terhadap Amerika Serikat. Sama halnya dengan *the USA patriot Act* yang dibentuk pada tahun 2001, kebijakan *Homeland Security Act 2002* juga merupakan serangkaian dari penerapan kebijakan *war on Terrorism*.

Dalam rangka menjaga keamanan domestik dari ancaman terorisme, Amerika Serikat membentuk departemen khusus yang menangani masalah-masalah keamanan negara yaitu untuk mencegah terjadinya kembali serangan terorisme di Amerika Serikat, mengurangi dampak kerusakan yang ditimbulkan dari adanya serangan terorisme serta memulihkan kembali kondisi Amerika Serikat baik kondisi psikologis

warga negaranya maupun kondisi Amerika Serikat itu sendiri sebagai negara *superpower*¹².

Tragedi 11 September 2001 merupakan titik balik bagi politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Dunia Islam.¹³ Politik luar negeri Amerika Serikat dijadikan sebagai sarana untuk melancarkan perang melawan terorisme dimana pada saat itu pemerintah Amerika Serikat mengkaitkan terorisme dengan kalangan Islam radikal sehingga muncul istilah *Islamophobia*.

Islamophobia merupakan bentuk ketakutan mayoritas non Islam terhadap Islam karena adanya isu terorisme. Melihat potensi Amerika Serikat yang merupakan negara *superpower*, tidak diherankan jika banyak masyarakat internasional yang berhasil diyakinkan serta memaksa negara-negara sekutu Amerika Serikat untuk mendukung politik luar negeri Bush. Dalam pidatonya Bush mengajak rakyat Amerika untuk berperang melawan terorisme. Selain menyerukan untuk melawan terorisme, Bush mengatakan bahwa operasi militer menjadi pilihan yang tidak bisa dihindari untuk melawan terorisme.¹⁴

Runtuhnya gedung WTC dan rusaknya gedung *Pentagon* pada 11 September 2001, mengakibatkan permasalahan mengenai teroris dan Islam semakin kompleks. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap konflik dunia yang melibatkan pemerintahan Amerika Serikat dengan Islam. Banyak

¹² The Senate and House of Representatives of the United States (2002). *Homeland Security Act of 2002*. United States of America: publik Law 107-296, 107th Congress.

¹³ Cipto, Bambang (2011). *Dunia Islam dan Masa Depan Hubungan Internasional di Abad 21*. Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

¹⁴ Khairani, Tiara Putri, *Op.Cit* hal 2

masyarakat dunia yang percaya mengenai stigma negatif yang menyatakan bahwa muslim adalah teroris. Tidak heran jika masyarakat dunia percaya dengan apa yang dilontarkan oleh pemerintah Amerika Serikat pada saat ini mengingat Amerika Serikat merupakan negara *superpower* yang patut untuk disegani bahkan dipercaya.

Selain negara-negara yang berada di Timur Tengah yang mengalami kendala baik pemerintahan maupun masyarakatnya, negara-negara mayoritas muslim juga mendapatkan pengaruh yang cukup berarti. Pasalnya dalam menjalankan kebijakan tersebut, Amerika Serikat juga membatasi arus masuk generasi muda Islam yang memiliki nama Arab dari negara-negara muslim maupun negara mayoritas muslim. sejak terjadinya peristiwa tersebut, calon mahasiswa yang akan menuntut ilmu di Amerika Serikat mengalami kesulitan akses sehingga mereka harus memilih melanjutkan kuliah di negara Barat selain Amerika Serikat.¹⁵

Dampak yang diberikan dari kebijakan tersebut sangatlah besar bagi masyarakat muslim didunia sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa kebijakan tersebut juga memberikan dampak yang besar bagi minoritas muslim yang ada di Amerika Serikat itu sendiri terutama dalam bidang politik.

¹⁵ Cipto, Bambang, *Op.Cit* hal 11

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang sudah dijelaskan diatas, penulis kemudian dapat menarik pokok permasalahan yang nantinya akan dibahas dalam skripsi ini yaitu “*Bagaimana pengaruh kebijakan War on Terrorism terhadap partisipasi politik minoritas muslim Amerika Serikat?*”

C. KERANGKA PEMIKIRAN

Untuk membantu penulis dalam menjelaskan fenomena tersebut, penulis kemudian menggunakan Konsep *Public Policy* dan Konsep Partisipasi Politik.

1. Konsep *Public Policy*

Menurut Hoogerwerf, objek dari ilmu politik merupakan kebijakan pemerintah, bagaimana proses terbentuknya serta akibatnya. Sehingga Hoogerwerf menyimpulkan bahwa Kebijakan Publik (*Public Policy*) adalah membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan.¹⁶ Sehingga dapat diartikan bahwa kebijakan publik merupakan salah satu sarana pemerintah untuk membentuk masyarakat yang terarah dengan menggunakan kekuasaan yang mereka miliki.

Sedangkan menurut David Easton yang menyatakan bahwa ilmu politik merupakan studi mengenai terbentuknya kebijakan umum. Dalam buku *The Political System*, David Easton menyatakan bahwa

¹⁶ Budiarto, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hal.21

*“Political life concerns all those varieties of activity that influence significantly the kind of authoritative policy adopted for a society on the way it is put into practice. We are said to be participating in political life when our activity relates in some way to the making and execution of policy for a society”.*¹⁷

Hal ini berarti bahwa kehidupan politik terdiri dari bermacam-macam kegiatan yang mempengaruhi kebijakan dari pihak yang berwenang, yang diterima untuk suatu masyarakat, dan yang mempengaruhi cara untuk melaksanakan kebijakan itu. Sehingga masyarakat akan melakukan partisipasi dalam kehidupan politik jika aktivitas yang mereka lakukan memiliki hubungan dengan pembuatan serta pelaksanaan kebijakan untuk masyarakat.

Berdasarkan definisi tersebut, terbentuknya kebijakan *“War on Terrorism”* melatarbelakangi masyarakat minoritas muslim di Amerika Serikat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam politik serta berusaha untuk mengambil peran dalam proses pembuatan kebijakan.

2. Konsep Partisipasi Politik

Menurut Herbert McClosky yang merupakan seorang tokoh masalah partisipasi berpendapat bahwa Partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari warga masyarakat dimana mereka ikut mengambil bagian dalam proses pembentukan kebijakan umum (*The*

¹⁷ Budiarto, Miriam. (2008). Ibid

*term political participation will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy).*¹⁸

Dalam penjelasan tersebut, fokus utama dari keikutsertaan masyarakat dalam politik dilatarbelakangi oleh tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah.

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam *No Easy Political Participation in Developing Countries* menjelaskan bahwa Partisipasi politik merupakan kegiatan masyarakat yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif. (*By political participation we mean activity by private citizens designed to influence government decision making, participation may be individual or collective, organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffective*).¹⁹

Masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam proses politik seperti memberikan hak suara atau kegiatan lain dilatarbelakangi oleh adanya keyakinan bahwa dengan melalui kegiatan bersama tersebut diharapkan kepentingan mereka akan tersalur atau setidaknya diperhatikan, serta mereka dapat mempengaruhi tindakan dari para pengambil keputusan

¹⁸ Budiarto, Miriam. (2008). *Ibid hal 367*

¹⁹ Budiarto, Miriam, *ibid*, hal. 368

dalam membuat keputusan yang mengikat yang sesuai dengan kepentingan mereka. Mereka percaya bahwa melalui kegiatan yang mereka lakukan mempunyai efek politik (*political Efficacy*).²⁰

Bentuk partisipasi politik yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi politik yaitu berdasarkan hasil pemilihan umum (*Voting*), namun terdapat bentuk partisipasi politik lain yaitu partisipasi politik melalui kelompok. Bentuk partisipasi politik melalui kelompok dapat dilihat dari adanya keterlibatan para kelompok kepentingan dalam politik misalnya dengan ikut memberikan dukungan terhadap kandidat-kandidat yang mereka anggap memiliki visi dan misi yang identik dengan kepentingan mereka melalui pemberian dana kampanye terhadap kandidat tersebut.

Keterlibatan politik melalui kelompok dilakukan karena mereka menyadari bahwa suara satu orang hanya memiliki sedikit pengaruh terutama dinegara-negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar. Melalui kegiatan menggabungkan diri dengan orang lain yang memiliki kepentingan yang sama dan menjadi suatu kelompok, diharapkan tuntutan serta aspirasi mereka akan lebih didengar oleh pemerintah.²¹

Tujuan utama dari kelompok ini yaitu untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah agar lebih menguntungkan serta memperbaiki kehidupan mereka agar terhindar dari diskriminasi yang dilakukan oleh kaum mayoritas.

²⁰ Budiarmo, Miriam, *Ibid*

²¹ Budiarmo, Miriam, *ibid*. Hal 382

Salah satu contoh dari kelompok tersebut yaitu minoritas muslim yang ada di Amerika Serikat. Pasca terjadinya serangan WTC, minoritas muslim di Amerika Serikat mendapatkan permasalahan yang lebih kompleks, diskriminasi yang dilakukan oleh kaum mayoritas disana semakin meningkat. Berbagai bentuk kecurigaan, penghinaan, diskriminasi bahkan kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat non muslim di Amerika Serikat terhadap mereka semakin meningkat. Kebijakan yang dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan nasional Amerika Serikat dari ancaman terorisme kemudian berakhir dengan dirampasnya kebebasan sipil dari para minoritas muslim di Amerika Serikat.

Berawal dari ketidakadilan yang mereka rasakan karena adanya kebijakan *War on Terrorism* tersebut akhirnya membuat minoritas muslim Amerika Serikat yang pada awalnya hanya berdiam diri ketika hak mereka sebagai warga negara dirampas kemudian berinisiatif untuk lebih aktif dalam partisipasi politik.

Munurut Prof. Dr. Bambang Cipto dalam bukunya "*Politik dan Pemerintahan Amerika*", partisipasi politik di Amerika Serikat berbeda dengan partisipasi politik di negara-negara demokrasi baru. Partisipasi politik di Amerika memiliki jenis-jenis yang beragam yang memungkinkan masyarakat untuk memilih jenis partisipasi yang dianggap sesuai dengan kehendak mereka. Sebagai negara demokrasi pemerintah federal maupun pemerintah negara bagian tidak berwenang

untuk memaksakan kehendak mereka. Berbagai bentuk partisipasi politik di Amerika Serikat diantaranya adalah memberikan suara (*voting*), ikut berkampanye, kegiatan komunitas, mengontak pejabat (*Contacting Official*), protes sebagai bentuk partisipasi, serta mencalonkan diri.²²

Peningkatan bentuk partisipasi yang dilakukan oleh minoritas muslim di Amerika Serikat didasarkan pada tekad mereka untuk menghentikan berbagai bentuk diskriminasi yang telah mereka alami baik sebelum maupun sesudah terjadinya tragedi WTC. Pasca terjadinya tragedi WTC partisipasi politik minoritas muslim Amerika Serikat mengalami peningkatan, hal tersebut dapat dilihat dari bentuk partisipasi yang dilakukan oleh mereka yang semula hanya berpartisipasi dalam pemilihan umum, *lobbying* yang dilakukan oleh organisasi muslim terhadap para pejabat publik, ikut berkampanye dengan cara memberikan bantuan dana kampanye kepada kandidat-kandidat politik bergeser menjadi partisipasi politik dalam bentuk mencalonkan diri.

Mencalonkan diri untuk merebut jabatan publik merupakan bentuk partisipasi yang paling dinamis. Pada tahapan ini partisipasi seseorang mendekati puncak partisipasi politik, dalam arti, ketika seseorang berhasil menduduki jabatan publik maka ia tidak hanya mempengaruhi sistem namun dapat sekaligus mengubah kualitas serta arah gerak dari

²² Cipto, Bambang (2003). *Politik dan Pemerintahan Amerika*. Yogyakarta: Lingkaran.

sistem politik. Mencalonkan diri untuk merebut jabatan publik merupakan kegiatan menarik karena tidak kurang dari 500.000 jabatan publik hanya dapat dicapai melalui proses pemilihan.²³

6 tahun pasca tragedi 9/11, kondisi minoritas muslim di Amerika Serikat menjadi lebih baik, partisipasi politik yang dilakukan oleh minoritas muslim Amerika Serikat tidak hanya dalam bentuk *lobbying* serta ikut berkontribusi dalam pemilihan umum saja, namun mereka juga menunjukkan bahwa mereka mampu menjadi warga negara yang baik sama halnya dengan warga negara Amerika Serikat lainnya. Hal tersebut terbukti pada tahun 2006, Keith Ellison yang merupakan seorang muslim dan anggota dari partai Demokrat terpilih sebagai anggota Kongres.²⁴ Keith Ellison tercatat sebagai warga muslim satu-satunya yang menjadi anggota Kongres. Keith Ellison menjabat dari tahun 2006 hingga tahun 2008.²⁵ February 2007, Zalmay Khalilzad yang merupakan warga asli keturunan Afghanistan terpilih sebagai *US Ambassador* untuk PBB, beberapa kelompok kepentingan muslim juga memiliki pengaruh terhadap Amerika Serikat seperti *Council on American-Islamic Relations*, *American Muslim Alliance* yang memiliki tujuan untuk mengirimkan perwakilannya ke Dewan perwakilan rakyat,

²³ Cipto, Bambang, Ibid

²⁴ VOA Indonesia., (2014)., *Anggota ongres AS yang Muslim Hadapi Isu ISIS* diakses dari <http://www.voaindonesia.com/a/anggota-kongres-as-yang-muslim-hadapi-isu-isis/2507122.html> diakses pada 24 April 2017

²⁵ Sinno, Abdulkader H. (2009). *Muslim in Western Politics*. Bloomington: Indiana University Press.

serta *the Muslim public Affairs Council* (MPAC) yang berfokus pada isu HAM.²⁶

Edina Lekovic merupakan seorang muslim yang juga bergabung dalam organisasi *the Muslim public Affairs Council* (MPAC) yang menjabat sebagai *Communication Director* untuk Los Angeles dan Washington.²⁷ Hal tersebut menjadi bukti bahwa pasca dibentuknya kebijakan *War on Terrorism* partisipasi politik minoritas muslim di Amerika Serikat mengalami peningkatan.

Pasca terjadi tragedi WTC, muslim minoritas Amerika yang mencalonkan diri sebagai pejabat publik mengalami peningkatan. Alasan utama mereka ingin ikut berpartisipasi mencalonkan diri sebagai pejabat publik yaitu agar mereka terbebas dari segala macam bentuk diskriminasi, dapat menyampaikan aspirasi, dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan yang dapat menguntungkan mereka, serta mendapatkan hak mereka sebagai warga negara Amerika Serikat.

D. HIPOTESA

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka teori yang digunakan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa pengaruh kebijakan *War on terrorism* terhadap partisipasi politik minoritas muslim di Amerika Serikat

²⁶ Hujer, Marc & Steinvorh, Daniel. (2007, September 13). *A Lesson for Europe*. Retrieved November 9, 2016, from American Muslims Strive to Become Model Citizens: <http://www.spiegel.de/international/world/a-lesson-for-europe-american-muslims-strive-to-become-model-citizens-a-505573.html>

²⁷ Hujer, Marc dan Steinvorh, Daniel, *Ibid*

adalah adanya peningkatan jumlah muslim yang menjabat sebagai pejabat publik di Amerika Serikat.

E. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui :

- a. Partisipasi politik minoritas muslim Amerika Serikat sebelum dan sesudah terjadinya serangan WTC,
- b. Pengaruh kebijakan *War on Terrorism* terhadap partisipasi politik minoritas muslim Amerika Serikat.

F. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah menggunakan pendekatan secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian sosial dalam ilmu sosial yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Metode ini lebih menekankan pada teknik pengumpulan data dan analisis teks tertulis.

Dalam penyajian data penulis mengumpulkan data-data dan teori yang berasal dari berbagai sumber melalui studi kepustakaan (*library research*) seperti buku-buku literature, jurnal-jurnal ilmiah, artikel-artikel, tulisan-tulisan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti termasuk dengan menggunakan akses internet. Oleh karena itu, artikel

tercetak maupun digital merupakan materi yang berguna sebagai penunjang pembuatan skripsi ini.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah membahas persoalan dalam penulisan skripsi ini, maka telah disusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Dikemukakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok permasalahan (rumusan masalah), kerangka teori, hipotesa, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Menjelaskan tentang latar belakang kedatangan minoritas muslim dan keterlibatannya dalam politik di Amerika Serikat sebelum tragedi WTC,

BAB III : Menjelaskan tentang tragedi WTC dan kebijakan *War on Terrorism*,

BAB IV : Menjelaskan tentang dampak kebijakan *War on Terrorism* terhadap muslim dan partisipasi politik minoritas muslim Amerika Serikat pasca tragedi WTC,

BAB V : Merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan.